

**PENGARUH BUDAYA PATRIARKI PADA PEREKONOMIAN  
KELUARGA BARU MENURUT PANDANGAN FEMINISME  
MARXIS SOSIALIS**

**Studi Kasus: Suku Nias**

**TESIS**



**Oleh:**

**Jesica Isarani Telaumbanua**

**8092101004**

**Pembimbing:**

**Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D**

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**2024**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH BUDAYA PATRIARKI  
PADA PEREKONOMIAN KELUARGA BARU MENURUT  
PANDANGAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS  
Studi Kasus: Suku Nias**



**Oleh:**


**Jesica Isarani Telaumbanua**

**8092101004**

**Disetujui Untuk Ujian Sidang Akhir Pada Hari/Tanggal**

**Selasa, 23 Juli 2024**

**Pembimbing Tunggal:**



**Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D**

**MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2024**



## SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jesica Isarani Telaumbanua  
Nomor Pokok Mahasiswa : 8092101004  
Program Studi : Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**“PENGARUH BUDAYA PATRIARKI PADA PEREKONOMIAN  
KELUARGA BARU MENURUT PANDANGAN FEMINISME MARXIS  
SOSIALIS. Studi Kasus: Suku Nias”**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan: di Bandung

Tanggal: 26 Juli 2024



Jesica Isarani Telaumbanua

**PENGARUH BUDAYA PATRIARKI  
PADA PEREKONOMIAN KELUARGA BARU MENURUT  
PANDANGAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS  
Studi Kasus: Suku Nias**

**Jesica Isarani Telaumbanua (8092101004)**

**Pembimbing: Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.**

**Magister Hubungan Internasional**

**Bandung**

**Juli 2024**

**ABSTRAK**

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam struktur keluarga dan masyarakat, seringkali dengan mengorbankan hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya patriarki, khususnya praktik mahar dalam masyarakat Suku Nias, memengaruhi perekonomian keluarga baru dan posisi perempuan dalam struktur sosial. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa maharyang tinggi dalam tradisi Suku Nias tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai objek transaksi sosial dalam masyarakat patriarkal. Berdasarkan teori feminis marxis sosialis yang dikembangkan oleh Rosemarie Tong, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem patriarki menyebabkan perempuan Nias mengalami situasi "*double minority*," di mana mereka menghadapi penindasan ganda sebagai perempuan dalam masyarakat patriarkis dan sebagai anggota komunitas yang lebih luas yang terpinggirkan. Dari perspektif marxis sosialis, sistem patriarki tidak hanya menindas perempuan secara individu tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan struktur ekonomi yang eksploitatif. Mahar yang tinggi dan beban finansial dari persembahan adat, seperti babi, uang, dan emas, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, membebani perempuan secara tidak proporsional. Sistem ini memperkuat ketergantungan perempuan pada laki-laki dan memperkuat posisi dominasi laki-laki dalam struktur sosial serta ekonomi. Dengan demikian, penindasan gender dalam konteks Suku Nias menggambarkan bagaimana patriarki dapat berfungsi sebagai alat untuk memperbesar kesenjangan kelas dan ketidakadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan marxis yang melihat patriarki sebagai bagian integral dari struktur kelas kapitalis yang lebih luas, di mana eksploitasi gender dan kelas saling terkait.

Kata Kunci: *Budaya Patriarki, Mahar, Perekonomian Keluarga, Feminis Marxis Sosialis, Double Minority, Suku Nias*

**THE INFLUENCE OF PATRIARCHY CULTURE ON THE NEW  
FAMILY ECONOMY ACCORDING TO THE VIEW OF SOCIALIST  
MARXIST FEMINISM. Case Study: Nias Tribe**

**Jesica Isarani Telaumbanua (8092101004)**

**Pembimbing: Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.**

**Master of International Relations**

**Bandung**

**July 2024**

***ABSTRACT***

*Patriarchy is a social system that places men as the primary power holders in family and community structures, often at the expense of women's rights. This study aims to explore how patriarchal culture, especially the practice of dowry in Nias society, affects the economy of new families and the position of women in the social structure. Using a qualitative approach, this study identified that high dowries in the Nias tradition not only create economic disparities but also strengthen women's position as objects of social transactions in a patriarchal society. Based on the Marxist-socialist feminist theory developed by Rosemarie Tong, the findings of this study indicate that the patriarchal system causes Nias women to experience a "double minority" situation, where they face double oppression as women in a patriarchal society and as marginalized members of the wider community. From a Marxist-socialist perspective, the patriarchal system not only oppresses women individually but also serves to maintain an exploitative economic structure. High dowries and the financial burden of customary offerings, such as pigs, money, and gold, exacerbate economic and social inequalities, burdening women disproportionately. This system reinforces women's dependence on men and strengthens men's dominant position in social and economic structures. Thus, gender oppression in the context of the Nias Tribe illustrates how patriarchy can function as a tool to enlarge class disparities and social injustice. This is in line with the Marxist view that sees patriarchy as an integral part of the broader capitalist class structure, where gender and class exploitation are intertwined.*

*Keywords: Patriarchal Culture, Dowry, Family Economy, Socialist Marxist Feminist, Double Minority, Nias Tribe*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa atas segala berkat dan kash karunia-Nya, tesis dengan judul ***PENGARUH BUDAYA PATRIARKI PADA PEREKONOMIAN KELUARGA BARU MENURUT PANDANGAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS. Studi Kasus: Suku Nias***, ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hubungan Internasional pada program studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Maka itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kash dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, dan yang terhormat Ibu Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. dan Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. selaku Dosen Penguji dalam kesempatan ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang se besar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Studi dan seluruh dosen program studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Katolik Parahyangan
2. Papa, mama, kakak Hariesty Telaumbanua, abang Febri Gulo dan adik-adik (Timothy Telaumbanua, Aloysius Telaumbanua dan Iel Telaumbanua) yang selalu memberikan dengan cinta kasihnya, dukungan dan semangat, dukungan materi dan doa kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini
3. Abang terkasih Dicky Fron Fataya Zega atas segala usaha, perhatian dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis
4. Teman-teman tersayang (Debora Gulo, Friska Mendrofa, Anastasia Laowo, Elda Harefa, Angelica Zega, Trias Zega dan Oinike Lase) yang telah

mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan tesis ini

5. Seluruh narasumber yang rela meluangkan waktunya untuk mendukung penelitian ini
6. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis selama proses penulisan tesis ini

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini. Semua kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan ini sangat dinantikan.

Bandung, 19 Juli 2024



Jesica Isarani Telaumbanua

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR SINGKATAN .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Fokus Masalah .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Kajian Literatur .....	12
1.7 Kerangka Pemikiran .....	19
1.7.1 Feminisme Marxis Sosialis .....	19
1.7.2 Konsep Budaya Patriarki .....	23
1.7.3 Konsep pernikahan .....	26
1.7.4 Konsep Mahar pernikahan .....	28
1.8 Metode Penelitian .....	29
1.8.1 Instrumen Penelitian .....	29
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data .....	29
1.9 Sistematika Penulisan .....	30
BAB II BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI DASAR EKONOMI KAPITALIS	31
2.1 Perkembangan Budaya Patriarki .....	31
2.1.1 Internasional .....	31
2.1.2 Asia .....	36
2.1.3 Indonesia .....	46
2.1.4 Suku Nias .....	48
2.2 Faktor Pembentuk Budaya Patriarki .....	56

2.2.1 Faktor Fisik .....	56
2.2.2 Faktor Psikologis .....	60
2.2.3 Faktor Materialisme Sejarah .....	65
2.3 Dampak Budaya Patriarki .....	69
2.3.1 Perbedaan Pembagian Wilayah .....	69
2.3.2 Perbedaan Pemberian Upah .....	70
2.3.3 Perbedaan Pandangan Seksualitas .....	72
2.3.4 Patriarki dalam Kekerasan .....	73
2.3.5 Perbedaan Gender dalam Budaya .....	74
2.3.6 Perbedaan Pembagian Gender oleh Negara .....	75
2.3.7 Perempuan menjadi Double Minority .....	76
2.3.8 Peran Organisasi Internasional dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan .....	79
<b>BAB III POSISI PEREMPUAN BERDASARKAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS .....</b>	<b>81</b>
3.1 Feminis Marxis Sosialis .....	81
3.2 Posisi Perempuan .....	83
<b>BAB IV PENGARUH EKONOMI KEPADA KELUARGA BARU YANG MENGANUT BUDAYA PATRIARKI MENURUT PANDANGAN FEMINIS MARXIS SOSIALIS .....</b>	<b>88</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	88
4.2 Karakteristik Narasumber .....	90
4.3 Hasil Analisis Penelitian .....	96
4.4 Pembahasan .....	137
4.4.1 Asal Usul Suku Nias dan Pembentukan Fondrakõ .....	137
4.5.2 Budaya Patriarki dan Kapitalisme .....	138
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>144</b>
5.1 Kesimpulan .....	144
5.2 Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Pulau Nias .....	91
Gambar 4. 2 Asal Usul Pulau Nias Nias (Lukisan dari P. Johannes M. Hämmerle) .....	93
Gambar 4. 3 Laki-laki Suku Nias memakai perhiasan adat Nias .....	93
Gambar 4. 4 Perempuan Suku Nias memakai perhiasan adat Nias .....	94
Gambar 4. 5 Tempat Masyarakat Suku Nias berkumpul untuk mengesahkan hukum adat Nias “Fondrakõ” .....	95
Gambar 4. 6 Pesta Pernikahan Adat Nias .....	100
Gambar 4. 7 Masyarakat Suku Nias Berkumpul Untuk Acara Adat Dan Di Beri Persembahan Berupa Rahang Babi "Zimbi" Sebagai Bentuk Penghormatan ....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Antar Negara .....	52
Tabel 4. 1 Narasumber .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .....	146
----------------	-----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Budaya patriarki yang mendominasi banyak masyarakat saat ini menciptakan fenomena sosial yang signifikan dalam hubungan gender. Sistem garis keturunan patrilineal tidak hanya menjadikan laki-laki sebagai penerus nama keluarga, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berdampak langsung pada penempatan perempuan dalam struktur sosial, di mana mereka seringkali dipandang sebagai subordinat yang tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh laki-laki sering kali terjadi, mengakibatkan berbagai bentuk diskriminasi yang merugikan kehidupan perempuan.

Fenomena ini terlihat dalam praktik pemilihan anak laki-laki sebagai prioritas dalam keluarga, yang mengarah pada tindakan ekstrim seperti pembunuhan bayi perempuan dan aborsi berdasarkan jenis kelamin. Di berbagai belahan dunia, perempuan seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, hanya karena status gender mereka. Misalnya, di banyak negara berkembang, adanya preferensi terhadap anak laki-laki menciptakan ketidakseimbangan gender yang signifikan, yang berpengaruh pada dinamika sosial dan ekonomi.

Budaya patriarki juga berkontribusi pada terbentuknya stereotip gender yang mengakar, di mana laki-laki diharapkan menjadi penyedia dan perempuan hanya bertanggung jawab atas urusan domestik. Situasi ini tidak hanya membatasi potensi individu perempuan, tetapi juga merugikan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global tentang isu-isu gender, penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana budaya patriarki menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya patriarki terhadap hubungan

gender dalam konteks internasional, dengan fokus pada bagaimana fenomena ini terus berlanjut dan memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan dan laki-laki. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang ada dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Berbeda dengan perempuan, anak laki-laki diharapkan dapat menjadi penerus keluarga, membawa nama keluarga dan garis keturunan. Sedangkan di sisi lain, perempuan bukanlah sebagai penerus keturunan keluarga dan akan meninggalkan rumah orang tua nya apabila telah menikah dan ikut dengan suaminya, sehingga, menyebabkan perawatan dan perlakuan yang diberikan kepada anak perempuan tidak akan sebaik yang diberikan kepada anak laki-laki. Sehingga dalam artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terlihat dengan jelas budaya patriarki sudah terbentuk dari masa bayi dan kanak-kanak.<sup>1</sup>

Begitu juga halnya dengan negara Thailand, budaya patriarki yang dialami oleh aktivis perempuan di Thailand memiliki banyak tantangan, berbagai upaya mereka (perempuan) lakukan untuk menantang sistem budaya patriarki melalui aktivisme spiritual. Aktivis perempuan di Thailand mendapatkan pengucilan dari berbagai posisi seperti dalam kepemimpinan, status kelas, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah kumuh, dan juga status janda atau pun ibu tunggal, terkena dampak budaya patriarki di Thailand karena mereka tidak menerima dukungan dari mantan suami mereka sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dan trauma gender.

Laki-laki memandang perempuan yang menjadi anggota gerakan sosial bukanlah sebagai aktivis gerakan sosial, melainkan sebagai objek seksualitas mereka. Lebih parah lagi, bahkan suami-suami dari para aktivis perempuan ini tidak mendukung mereka mengambil posisi kepemimpinan karena masih diharapkan di dalam budaya Thailand bahwa perempuan harus mengurus anak dan rumah tangga, sehingga mereka (perempuan) hidup melalui pelecehan dan kekerasan rumah tangga dan melemahnya aktivis perempuan di Thailand ini pun didukung oleh praktik-praktik spiritual Buddhis tradisional. Yang dalam peristiwa ini perempuan dilarang untuk ditahbiskan sehingga mereka (perempuan) tidak diberi akses

untuk belajar teks, ajaran dan praktik meditasi spiritual Buddhis. Sebagai contoh dalam hal ini, terdapat aturan dalam budaya Buddha Thailand utara yang membatasi akses perempuan dan anak perempuan ke Dharma Buddha, seperti tidak diperbolehkan masuk dalam kuil tertentu dan belajar atau bersama seorang biksu sendirian.<sup>1</sup>

Menurut (EIGE) *European Institute for Gender Equality* pada tahun 2023, masih menunjukkan ketimpangan gender terutama terhadap perempuan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang pendapatan yang menerima upah yang lebih kecil bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali, bidang pekerjaan yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (*skill*), bidang pendidikan yang terbatas walaupun dalam hal ini perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, bidang waktu yang harus lebih fokus terhadap pekerjaan rumah tangga (perawatan), bidang kekuasaan yang lebih sedikit berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan bidang kesehatan terhadap akses terbatas dan ketahanan tubuh perempuan yang lebih rentan terkena penyakit, dan bidang kekerasan yang perempuan lebih rentan mengalami hal ini baik secara fisik dan psikis.<sup>2</sup> Tidak hanya terjadi pada wilayah internasional, budaya patriarki juga terjadi dalam wilayah nasional seperti di Indonesia, salah satunya terjadi di wilayah Madura Pesisir. Budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat Madura pesisir ini sangat kental terjadi karena adanya doktrin agama yang kuat sehingga menyebabkan masyarakat Madura pesisir memegang teguh kebiasaan dimaksud yang berujung pada efek budaya patriarki tersebut. Hal ini dilihat dari masyarakat Madura pesisir sangat menjaga dan menganggap perempuan (baik istri dan anak).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat salah satu dampak yang sangat sering terjadi dalam budaya patriarki di Indonesia adalah kekerasan pada perempuan, baik verbal dan non verbal. Bahkan menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan) pada CATAHU 2023, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup publik dan negara masih minim untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

---

<sup>1</sup> Khuankaew, 2020. Grassroots Women Transforming Patriarchy With Spiritual Activism. *Journal Of Feminist Studies In Religion*

<sup>2</sup> <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-equality-index-2023-towards-green-transition-transport-and-energy>

Data kekerasan terhadap perempuan yang tercantum masih menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi upaya untuk pencegahan dan penanganan masih belum ada perkembangan. Kekerasan psikis dalam hal ini menjadi kekerasan ketiga terbanyak selama tahun 2022, dan kekerasan di ranah publik masih menjadi yang terbanyak dengan 1.276 kasus. Kekerasan di ranah publik yang terjadi antara lain yaitu pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, perdagangan orang khususnya perempuan (*human trafficking*), kekerasan seksual dan pencabulan<sup>5</sup>. Kekerasan fisik pada perempuan dapat mengakibatkan kematian, atau pelecehan seksual dapat memberikan dampak tertularnya perempuan pada penyakit menular seksual, atau kekerasan verbal dapat mengakibatkan gangguan mental terhadap Perempuan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut lagi, bahkan dalam dunia pekerjaan pun persentase tenaga kerja laki-laki lebih besar daripada tenaga kerja perempuan sebagaimana yang tercatat dalam survey BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja laki-laki sebesar 65,35% (*enam puluh lima koma tiga puluh lima persen*) dan sedangkan tenaga kerja perempuan di angka 34,65% (*tiga puluh empat koma enam puluh lima persen*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak untuk menempati posisi-posisi strategis dibandingkan tenaga kerja perempuan, yang mana budaya patriarki lebih mengutamakan posisi laki-laki dibanding perempuan yang dirancang hanya untuk melakukan pekerjaan domestik (*hal mana menunggu pulangnya laki-laki dari mencari uang dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan rumah*) sehingga tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam berbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, laki-laki dianggap sebagai sumber uang atau pencari nafkah, sehingga laki-laki layak memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga, memegang kekuasaan dan pemegang kendali keluarga. Sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga, tidak mencari nafkah dan hanya dapat bergantung kepada laki-laki untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sehingga hal ini perempuan akan merasa berutang dan bergantung kepada laki-laki dan perempuan harus patuh dengan laki-laki dengan aturan

---

<sup>3</sup> <https://Komnasperempuan.Go.Id/Catatan-Tahunan-Detail/Catahu2023-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Di-Ranah-Publik-Dan-Negara-Minimnya-Perlindungan-Dan-Pemulihan>

yang merenggut hak-hak perempuan<sup>4</sup>. Hal tersebut sangat mungkin terjadi akibat dari budaya patriarki yang telah menjadi salah satu budaya yang bertahan sampai sekarang terutama di negara Indonesia. Di mana peristiwa ini dapat terjadi yang diawali dengan adanya suatu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga nantinya secara otomatis menimbulkan patriarki secara tidak langsung karena dianggap sebagai satu kesatuan dalam suatu proses untuk ikatan pernikahan . Dalam pernikahan, budaya patriarki merupakan salah satu efek yang menjadi penyebab berbagai permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Efek tersebut menjadi suatu cakupan yang sangat luas baik pernikahan yang terjadi di ranah internasional, nasional dan regional. Hal mana dapat dilihat seperti di negara Nigeria, patriarki terlihat pada persiapan pernikahan yang biasanya diatur oleh ayah atau saudara laki-laki dari mempelai pria bersama dengan orang tua mempelai perempuan. Dalam tradisinya menggunakan dasar alkitab pada perjanjian lama, akan ada mahar yang akan di persiapkan untuk di bayarkan kepada keluarga perempuan dengan harga yang bervariasi<sup>5</sup>

Fenomena budaya patriarki sangat erat kaitannya dengan pemberian mahar pernikahan pada pihak perempuan yang pembeliannya disesuaikan dengan permintaan pihak keluarga, yang tak jarang permintaan terhadap mahar tersebut tidak sesuai dengan keadaan ekonomi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak calon pengantin. Pemberian mahar ini dianggap sebagai kompensasi kepada keluarga pengantin perempuan atas “kehilangan-nya” serta uang pengganti atas pengeluaran yang telah mereka berikan kepada anak perempuan mereka. Oleh karena itu, dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah patriarki baik dalam area internasional, nasional maupun regional namun tidak terbatas pada sejarah, dampak, dan faktor-faktor lain yang memperkuat fenomena ini.

Akibat pandangan masyarakat terhadap budaya patriarki, apabila seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, maka ia harus memberikan mahar sesuai permintaan keluarga pihak perempuan. Seringkali tingginya permintaan mahar membuat laki-laki harus mencari cara untuk memenuhi mahar tersebut ini akan mengganggu perekonomian laki-laki dan

---

<sup>4</sup> <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/28/Peran-Perempuan-Di-Dunia-Kerja-Belum-Setara>

<sup>5</sup> Solomon, Ademiluka, 2021. Bride Price And Christian Marriage In Nigeria. Hts Teologiese Studies, Aosis

jika mahar tidak dibayar maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Mahar merupakan hal yang penting sesuai prinsip hukum adat yang sah karena hal ini dilakukan untuk mengganti kerugian atas hilangnya keperawanan perempuan tersebut atau suatu saat suaminya meninggal. Penetapan mahar pun menjadikan laki-laki dan keluarganya menjadi pemilik yang sah atas semua keturunan yang dilahirkan perempuan tersebut. Penggunaan mahar dalam pernikahan bukanlah hal yang baru, tidak jauh berbeda, pedesaan Tiongkok menjadikan pernikahan merupakan alat untuk bereproduksi yang menganggap pernikahan menjadi suatu transaksi barter atau pertukaran kepemilikan.

Keluarga perempuan akan menerima suatu mahar dan keluarga laki-laki akan mendapatkan seorang perempuan yang akan dijadikan istri atas pembayaran mahar tersebut. Perempuan yang dijadikan istri tersebut akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan kemudian akan menarik diri dari ranah publik, karena perempuan tersebut telah menjadi satu kesatuan dari keluarga laki-laki dan wajib memenuhi tanggung jawab dengan membesarkan dan mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan domestik dan sementara laki-laki yang akan bekerja di ruang publik. Dalam proses persiapan pernikahan pun, banyak perempuan di daerah pedesaan Tiongkok yang berhenti dari pekerjaannya dengan alasan mempersiapkan kelahiran anak, mengurus rumah tangga dengan dalih kehidupan perempuan tersebut akan terjamin karena suaminya akan memenuhi kebutuhan, sehingga terlihat pernikahan yang menggunakan mahar akan mengendalikan dan mengekang perempuan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana dalam persiapan pernikahan terutama dalam pernikahan adat sangat terlihat budaya patriarki antara laki-laki dan perempuan, walaupun di samping itu terdapat banyak contoh baik dalam Internasional, Nasional sampai dengan Regional (*yang telah diuraikan di atas*) yang masih menggunakan budaya patriarki dengan segala dampak terhadap pasangan laki-laki dan perempuan sebelum memulainya suatu ikatan pernikahan. Perlu dipahami bahwa Patriarki di Indonesia telah menciptakan tantangan serius terhadap upaya mencapai kesetaraan gender, meresap ke dalam berbagai

---

<sup>6</sup> Chen, Pan, 2023. Bride Price And Gender Role In Rural China

aspek kehidupan masyarakat. Sistem nilai yang mengedepankan dominasi laki- laki mengakibatkan perempuan sering kali terpinggirkan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Perempuan ditempatkan pada posisi subordinat, dengan harapan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sementara partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi diabaikan.

Praktik- praktik ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan, tetapi juga memperkuat stigma dan diskriminasi yang berujung pada kekerasan berbasis gender. Di banyak komunitas, norma- norma budaya yang kental mengakibatkan perempuan mengalami berbagai bentuk penindasan, mulai dari pembatasan akses pendidikan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan patriarki bukan sekadar masalah budaya, tetapi merupakan penghalang struktural yang menghambat kemajuan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan, menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan perubahan yang mendasar dan inklusif.

Bahwa dalam hal ini, dampak budaya patriarki sudah dapat dilihat sebelum terjadinya pernikahan itu sendiri, yang mana karena laki- laki dianggap sebagai makhluk dominan dan bakal menjadi tulang punggung sehingga laki- laki diberikan kekuasaan lebih dibanding perempuan (*dominan*) namun di samping itu juga terdapat *mahar* yang harus dipenuhi oleh laki- laki sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta kasih kepada perempuan yang dapat dihitung dari pendidikan, status dan kedudukan orang tua dari perempuan. Penerapan budaya patriarki dalam pernikahan adat di Indonesia ini adalah suku Nias yang berada pada Provinsi Sumatera Utara. Di mana dalam pernikahan adat suku Nias ini budaya patriarki masih sangat diterapkan dan dijunjung tinggi, sehingga menjadi salah satu faktor sulitnya acara adat pernikahan tersebut berjalan dikarenakan banyaknya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Penulis dalam tesis ini.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pernikahan adat, bahwa budaya patriarki berperan penting dalam memengaruhi proses persiapan pernikahan adat yang menggunakan perempuan sebagai alat kapitalisme sehingga sangat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemberian mahar oleh orang tua atau keluarga perempuan dan menggunakan mahar tinggi yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tersebut sebagai suatu pandangan yang baik dan dapat menaikkan derajat, gengsi serta alat untuk memperkaya keluarga.

Apabila pernikahan adat dilaksanakan (dalam hal ini mahar telah sanggup di bayarkan) pengantin baru tersebut harus melunasi utang mahar tersebut kepada saudara atau Bank, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar yang tinggi dengan terpaksa pihak laki-laki untuk memenuhinya, dapat memunculkan berbagai permasalahan-permasalahan baru seperti, terganggunya ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari, ketidaksiapan dalam hal menabung atau mencukupi persiapan selama kehamilan dan asupan gizi anak dalam perjalanan pengantin baru tersebut. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam pemberian mahar sangat memengaruhi kehidupan pengantin dan keluarga setelahnya. Di samping itu juga, perempuan tidak dapat memberikan suara atau haknya untuk menentukan seberapa besar kecil mahar tersebut padahal penentuan besar kecilnya mahar tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan keluarga barunya ke depan. Tujuan awal dari pemberian mahar ini adalah untuk menghormati dan mengesahkan pernikahan dan untuk mengikat dua keluarga laki-laki dan perempuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati diantara kedua pihak keluarga.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu makna pemberian mahar telah berubah. Dewasa ini mahar sekarang seperti dianggap sebagai alat jual beli perempuan yang dibungkus alasan biaya pernikahan. Orang tua dan keluarga perempuan meminta mahar yang tinggi dengan banyak faktor seperti ganti biaya selama pendidikan anak perempuan tersebut. Bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga mahar yang diminta, karena mereka memiliki pandangan pendidikan perempuan yang akan dinikahinya dapat



menentukan manfaat yang dibawanya ke keluarga laki-laki. Begitu juga halnya dengan status sosial perempuan atau keluarganya, jika memiliki status sosial yang tinggi, maka permintaan mahar akan tinggi juga. Permintaan mahar yang tinggi ini menyebabkan penundaan pernikahan sehingga tidak mau menikah, dan oleh karenanya mereka akan menghindari pernikahan dengan hidup bersama tanpa pernikahan yang sah. Mahar yang tinggi juga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga perempuan, laki-laki merasa frustrasi akibat beban keuangan yang ditanggungnya. Jika mahar tidak di bayarkan maka pasangan tersebut tidak boleh menikah, karena tidak di bayarkan nya mahar maka akan dianggap merendahkan pihak keluarga perempuan dan tidak akan di hargai di masyarakat sekali pun perempuan dan laki-laki tersebut sudah melakukan pernikahan<sup>9</sup>

Perempuan di Timor Leste menyampaikan bahwa mahar yang terlalu tinggi menimbulkan kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan beberapa alasan sebagai berikut: Ketegangan terasa pada keuangan dalam keluarga dalam memenuhi mahar yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Apabila keluarga laki-laki memiliki pendapatan yang rendah akan mempersulit memenuhi mahar tersebut sehingga menyebabkan masalah dalam hubungan yang dapat meningkat menjadi kekerasan pada pasangan. Kemudian praktik mahar seringkali memperkuat peran gender laki-laki dan tidak seimbang nya kekuasaan dalam hubungan pasangan. Keluarga perempuan berharap laki-laki dan keluarganya dapat memberikan mahar, karena menganggap perempuan adalah komoditas yang di perjual belikan dan dimiliki. Hal ini menjadikan pandangan masyarakat yang menerapkan mahar sebagai praktik umum yang wajib dilakukan membuat tekanan terhadap individu yang tidak dapat memenuhi standar permintaan mahar tersebut<sup>7</sup>.

Begitu juga dalam wilayah Indonesia, salah satunya pada pernikahan suku Nias yang seolah olah seperti transaksi jual beli anak perempuan kepada keluarga laki-laki, karena ketika mahar telah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga maka itu dianggap harga beli perempuan

---

<sup>7</sup> Rees, Et Al , 2017. Associations Between Bride Price Stress And Intimate Partner Violence Amongst Pregnant Women In Timor-Leste. Globalization And Helath, Biomed Centra

tersebut. Orang tua dan keluarga perempuan akan meminta mahar yang tinggi, tergantung jenjang pendidikan dan pekerjaan. Dalam hal ini pun orang tua dan keluarga perempuan akan mengukur derajat keluarga mereka diantara masyarakat, karena semakin terpendang keluarga tersebut maka semakin tinggi mahar yang akan di minta. Biaya pernikahan suku Nias sangat memberatkan kedua keluarga jika terlalu menuntut mahar yang tinggi. Karena biaya pernikahan pada suku Nias tersebut bisa masuk dalam kategori tinggi (*tidak sedikit*) mulai dari biaya mahar itu sendiri lalu pemenuhan kebutuhan pada acara-acara sebelum pesta adat dan setelah pesta adat.

Perlu diketahui juga bahwa dalam mahar tersebut sudah termasuk ke dalam uang yang akan diberikan kepada keluarga ibu dari perempuan dan saudara-saudara kandung perempuan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan permasalahan antara keluarga. Tidak terlepas sampai di situ, terdapat juga banyak rangkaian-rangkaian acara adat yang dilakukan dengan menggunakan biaya yang sangat besar. Adapun dalam proses pernikahan adat Suku Nias terdapat tradisi *tolo-tolo* yaitu bantuan dalam sejumlah uang yang diberikan kepada laki-laki baik dari keluarga maupun kerabat untuk menutupi biaya pernikahan adat yang besar.

Namun perlu diingat bahwa *tolo-tolo* ini tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi suatu saat akan dibalas dan diganti dengan sebesar *tolo-tolo* yang diberikan di awal. Biasanya pengantin baru akan menggantinya pada saat situasi-situasi tertentu seperti kerabat tersebut menikah, kematian (berduka) atau pun ketika keluarga atau kerabat tersebut membutuhkan uang tersebut. Oleh karena hal tersebut yang penulis uraikan di atas, melalui tesis ini Penulis ingin memberikan penjelasan bagaimana proses pemberian mahar yang dapat mempersulit kehidupan keluarga pengantin baru di mana yang menentukan jumlah atau tinggi rendahnya mahar tidak memiliki tanggung jawab setelahnya atas hal yang terjadi yang menimpa pengantin baru. Sehingga pada akhirnya yang akan menanggung utang dan biaya-biaya pernikahan yang belum selesai tersebut akan ditanggung oleh pengantin baru, dengan efek yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga pengantin baru tersebut baik dalam keuangan, komunikasi maupun hubungan antara suami istri.

### **1.3 Fokus Masalah**

#### **1.3.1 Pembatasan Masalah**

Penulis ingin memberikan limitasi bahwa dalam penelitian ini hanya mengambil isu pada masyarakat suku Nias yang berada di daerah Jabodetabek tentang mahar pernikahan. Bahwa salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah karena masyarakat suku Nias merupakan salah satu suku yang sampai sekarang masih memegang teguh budaya patriarki dengan permintaan mahar yang tinggi. Bahwa pada pelaksanaan pernikahan pada suku Nias, terdapat berbagai faktor-faktor yang sangat memengaruhi sesuatu hal dalam pengambilan keputusan pemberian mahar, yang nantinya faktor-faktor tersebut juga pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan adat tersebut.

#### **1.3.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada identifikasi masalah, maka masalah yang penulis rumuskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut; Bagaimana Pengaruh Peran Ekonomi Perempuan di Suku Nias dalam pernikahan dan keluarga?.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahar pada budaya patriarki memengaruhi ekonomi keluarga baru, khususnya pada masyarakat suku Nias.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan serta wawasan yang lebih luas pada bidang studi hubungan internasional, dan juga sebagai informasi yang dapat menjadi pedoman bagi pembaca termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat suku Nias itu sendiri untuk mengetahui dan mendalami

pengaruh ekonomi terhadap perekonomian keluarga baru menurut pandangan feminis marxis sosialis.

## 1.6 Kajian Literatur

Analisis dalam tesis ini dilakukan sesuai dengan beberapa kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku yang membahas dan sejalan dengan topik yang terkait dalam penelitian tesis ini. Penulis mencantumkan beberapa penelitian dan buku yang dilakukan sebelumnya, sehingga penulis memiliki pedoman untuk menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu atau faktor-faktor yang terjadi dalam pengambilan keputusan pemberian mahar pada adat pernikahan suku Nias. Berikut yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

*“Bride price and gender role in rural China”*, menyampaikan bahwa peran gender pada pernikahan di pedesaan Tiongkok diperkuat oleh praktik mahar dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam keluarga. Permintaan mahar yang tinggi oleh keluarga perempuan memicu pandangan bahwa perempuan adalah objek yang di diperjualbelikan. Ketidakberdayaan perempuan dalam memperjuangkan haknya dalam penentuan mahar menyebabkan tinggi rendahnya mahar di nilai dari keadaan ekonomi perempuan bagi calon suami dan keluarga calon suami. Sistem budaya patriarki keluarga di pedesaan Tiongkok yang mewajibkan laki-laki dan keluarganya untuk membayar sejumlah besar uang atau aset berharga.

Keluarga laki-laki memiliki pandangan kuat bahwa perempuan adalah aset atau harta benda yang dapat di pindahkan dari satu ke keluarga lain dengan syarat-syaratnya ditentukan oleh keluarga perempuan. Begitu pun beban dalam membayar mahar adalah tanggung jawab pihak laki-laki dan keluarganya sehingga dapat menyebabkan terganggunya keadaan ekonomi. Budaya patriarki yang dianut diperkuat dengan pandangan bahwa laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama dan pemberi nafkah bagi keluarga mereka. Sehingga ini memperkuat posisi perempuan bergantung pada laki-laki untuk keamanan finansial, yang semakin memperkuat posisi subordinat mereka dalam keluarga.

*“Marriage without meaningful consent and compromised agency”*, menyampaikan bahwa pernikahan di Jharkhand India di dominasi oleh keluarga besar baik perempuan maupun laki-laki sehingga banyak perempuan hanya menyetujui keputusan orang tua mereka dalam penentuan jodoh, karena mereka menyadari bahwa penolakan terhadap jodoh yang telah ditentukan akan mendapatkan peluang yang sangat kecil untuk dukungan di masa depan. Jodoh perempuan ditentukan berdasarkan karakteristik dalam masyarakat, tingkatan kasta dan hubungan antar keluarga, bukan berdasarkan kecocokan antara laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa aturan dan norma-norma ini lebih diutamakan oleh keluarga dan masyarakat untuk melakukan pertimbangan perencanaan pernikahan dibandingkan dengan pilihan laki-laki atau perempuan tersebut.

Kekhawatiran perempuan terhadap hilangnya dukungan di masa depan merupakan salah satu yang mendasari bahwa perempuan lemah dalam pengambilan keputusan rencana pernikahan. Perempuan akan membayarkan mahar kepada laki-laki yang telah dijodohkan dengannya. Sekali pun perempuan yang membayar mahar, tidak menutup kemungkinan untuk perempuan mendapatkan dampak yang lebih buruk seperti ketidaksetaraan gender, pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi, komunikasi yang terbatas dengan suami dan kemungkinan lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga<sup>13</sup>

*“Toward marriage sustainability impacts of delayed marriages in Qatar”*, menyampaikan bahwa penundaan pernikahan sangat mungkin terjadi. Seperti di Teluk Arab, Qatar. Banyak individu khususnya perempuan menunda pernikahan karena disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti:

1. Pendidikan dan Karir

Pendidikan dan peluang karier perempuan sangat memengaruhi waktu pernikahan. Ketika perempuan mengejar pendidikan tinggi dan membangun karier, mereka cenderung menunda pernikahan

2. Pola Adat Perjodohan

Pola adat perjodohan juga kontribusi terhadap penundaan pernikahan. Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin memprioritaskan mencari pasangan yang cocok untuk anak-anaknya, sehingga dapat memperpanjang proses pembentukan pernikahan

### 3. Biaya dan Pengeluaran pernikahan

Tingginya biaya yang terkait dengan pernikahan, seperti upacara pernikahan, biaya gedung pernikahan, pembayaran mahar, dan pengaturan tempat tinggal, dapat menyebabkan pria Qatar menunda pernikahan. Beberapa pria takut akan beban keuangan dan tanggung jawab pernikahan, yang mungkin memerlukan hutang atau pinjaman bank.

### 4. Bias Sosial dan Perbedaan Gender

Bias sosial dan perbedaan gender di tingkat rumah tangga juga dapat memengaruhi waktu pernikahan. Norma dan keinginan budaya mungkin memberikan tekanan yang lebih besar pada perempuan untuk menikah di usia yang lebih muda, sementara laki-laki mungkin menghadapi keinginan masyarakat untuk meneguhkan diri secara finansial sebelum menikah<sup>8</sup>

“Mahar dan Uang Panaik pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)”, Penelitian ini menyatakan bahwa uang panaik adalah tradisi yang turun temurun atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Laki-laki harus memenuhi dan menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjadi biaya walimah atau uang panaik kepada calon istri, alasan yang membuat mahar tinggi adalah pesta pernikahan adat yang dilakukan di Limpomajang harus diadakan dengan meriah, dan tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi biaya tersebut, mereka akan meminjam uang atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang panaik tersebut. Jika permintaan dari pihak

---

<sup>8</sup> Noora Lari, 2022. Toward Marriage Sustainability: Impacts Of Delayed Marriages In Qatar. Cogent Social Science

perempuan tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki akan malu. Oleh karena hal tersebut, dengan terpaksa melangsungkan pernikahan walaupun dengan uang panaik lebih mahal atau besar.<sup>9</sup>

“Pernikahan Adat Suku Buton Perspektif Teori *Hudud* Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)” . Dalam penelitian ini menyampaikan dalam pernikahan adat harus melihat status sosial karena menurut masyarakat desa Bahari status sosial merupakan harga diri. Keturunan bangsawan sangat berpengaruh di Buton, bahkan sampai sangat disegani pada daerah tersebut. Dalam pembayaran mahar kedudukan sosial sangat memengaruhi dan memiliki hitungannya sendiri serta pembayaran mahar harus di atas batas minimal. Di samping itu, pembayaran mahar juga sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan yang akan dinikahi. Bahwa adapun penjelasan dari adanya pernikahan silang dalam adat suku Buton adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda status sosial.

Dalam prosesnya keluarga yang ingin melamar harus melakukan lamaran secara tersembunyi, karena jika dilamar secara terang-terangan dapat menimbulkan malu kepada keluarga laki-laki jika lamaran tersebut tidak di terima oleh keluarga perempuan. Lamaran pun di dampingi oleh tokoh adat dan melakukan musyawarah mengenai besar kecil mahar yang akan di minta. Status sosial laki-laki tidak berpengaruh pada besar kecilnya pemberian mahar, tetapi berpengaruh pada keturunan pasangan tersebut nanti. Pembayaran harus mengikut adat perempuan dan harus memenuhi aturan dalam pemberian mahar. Jika ingin melangsungkan pernikahan maka mahar yang belum di bayarkan

---

<sup>9</sup> Iqbal, Sudirman, 2020. Mahar Dan Uang Panaik pernikahan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)

akan dianggap utang dan harus dilunasi sebelum pernikahan akan dilaksanakan<sup>10</sup>.

“Perempuan Papua Dan Mas Kawin; Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial”. Penelitian ini menjelaskan mas kawin dalam pernikahan di Papua sangat dipengaruhi oleh status pendidikan, kecantikan dan <sup>11</sup>keperawanan perempuan yang akan dinikahi. Jika perempuan tersebut memiliki status pendidikan yang tinggi, kecantikan dan ketika menikah masih perawan maka keluarga perempuan akan meminta mas kawin yang tinggi kepada pihak laki-laki. Mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki tersebut secara tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga perempuan .

“Nilai Luhur Mahar (Belis) dalam Ritus Adat pernikahan di Kabupaten Sikka- Nusa Tenggara Timur” . Bahwa dalam penelitian ini menyampaikan bahwa mahar merupakan nilai luhur yang turun temurun yang harus dipertahankan karena melambangkan penghormatan dan penghargaan bagi perempuan sebagai manusia, kemudian penghargaan kepada orang tua perempuan karena telah membesarkan anak perempuannya, mempererat hubungan sosial kedua belah pihak, sebagai lambang pengorbanan, penerus keturunan serta mahar juga dianggap sebagai pengganti susu ibu. Dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mahar akan mengikat kedua belah pihak apabila mahar tersebut belum dilunaskan. Laki-laki secara tidak langsung akan melunaskan mahar tersebut ketika dalam keluarga perempuan terjadi kemalangan seperti kematian, urusan adat, warisan, dan kegiatan adat lainnya<sup>12</sup>.

“Kedudukan Sompas (Mahar) dan Uang Belanja dalam pernikahan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” . Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan mahar adalah kebiasaan atau adat dari kelurahan Pasir

---

<sup>10</sup> Anjelina, 2019. Mahar pernikahan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Sakina : Journal Of Family Studies

<sup>11</sup> Tetelepta, Et Al, 2021 . Perempuan Papua Dan Mas Kawin; Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. Pute Waya, Sociology Of Religion Journal.

<sup>12</sup> Manuk, Bato, 2023. Nilai Luhur Mahar (Belis) Dalam Ritus Adat pernikahan Di Kabupaten Sikka - Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmu Sosial. Jisos



Putih. Namun dalam proses pemberian mahar, dapat berjalan sesuai harapan dan juga tidak sesuai dengan harapan. Sesuai atau tidaknya dikarenakan terdapat kendala yang sering dialami ketika proses penentuan pemberian mahar yaitu salah satunya adalah permintaan perempuan yang terlalu besar serta tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Mahar juga ditentukan faktor keturunan (jika bangsawan atau keturunan raja jumlah mahar akan tinggi), tingkat pendidikan juga memengaruhi (penentuan mahar pada perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, pendidikan yang biasa saja atau yang tidak memiliki pendidikan akan berbeda, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi juga mahar yang akan di minta). Sehingga akibat dari mahar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pernikahan yang tertunda, pembatalan pernikahan karena laki-laki mundur (tidak melanjutkan) atau pun pernikahan tidak dianggap sah karena mahar yang tidak ter-cukupi<sup>13</sup>.

*“Nias Marriage At Ehom Village, Mazo Sub District, South Nias District Analyzed Through Indonesian Marriage Regulations<sup>21</sup>”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan adat di suku Nias sebagian besar harus dirayakan besar-besaran dan mewah, proses pernikahan adat dari awal hingga akhir bisa berlangsung selama 1-2 minggu di luar persiapan yang dilakukan berbulan-bulan maupun tahun. Persiapan demi persiapan hingga acara dilaksanakan mengeluarkan uang yang tidak sedikit melihat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan selama acara tersebut berlangsung, sehingga untuk membuat acara yang sukses tersebut laki-laki harus mencari jalan keluar untuk mendapatkan biaya atas acara tersebut<sup>14</sup>.

“Perempuan Dan Adat pernikahan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat pernikahan Di Nias)” Penelitian ini menyampaikan bahwa

---

<sup>13</sup> Nurwahidah, Mustari, 2014 . Kedudukan Somp (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam pernikahan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Unm Journal

<sup>14</sup> Panjaitan, Dkk 2021, Nias Marriage At Ehom Village, Mazo Sub District, South Nias District Analyzed Through Indonesian Marriage Regulations. University Of Labuhanbatu, Indonesia

keluarga akan terus mengusahakan biaya jika berkaitan dengan acara, baik pernikahan, kematian atau pun kelahiran. Usaha ini bertujuan tidak lain untuk menjalankan acara tersebut menjadi acara yang sukses. Walaupun di satu sisi para keluarga kesusahan dalam keuangan tetapi karena ini adalah acara adat maka akan mengusahakan dengan meminjam kepada saudara atau bank. Hal tersebut dilakukan untuk keluarga tersebut akan dipandang baik oleh masyarakat.

Hal seperti ini sangat lumrah terjadi, kuatnya budaya patriarki pada masyarakat suku Nias membuat perempuan suku Nias tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat memperjuangkan hak nya dalam pengambilan keputusan dalam pemberian mahar. Perempuan harus patuh dengan keputusan dari orang tua dan keluarga, jika tidak maka perempuan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sehingga dapat menjadi aib keluarga. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan pemberian mahar sangat dipengaruhi oleh adat, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat karena masyarakat telah hidup berdampingan dengan adat istiadat.

Adapun dalam proses pengambilan keputusan pemberian mahar peran keluarga dan orang tua perempuan sangat berpengaruh. Di samping itu juga pandangan masyarakat terhadap status sosial juga dapat memberatkan pemberian mahar. Sehingga terbentuk suatu kebiasaan dalam masyarakat bahwa semakin tinggi mahar maka semakin baik dalam pandangan masyarakat atau gengsi keluarga karena ingin mengadakan pernikahan adat secara mewah yang secara kasat mata akan merugikan keluarga baru tersebut<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Efentinus Ndruru, 2017, Perempuan Dan Adat pernikahan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jajaran Adat Istiadat pernikahan Di Nias), Prodi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

## **1.7 Kerangka Pemikiran**

Sebagai landasan dalam melakukan analisis dan menjawab perumusan masalah: Bagaimana Pengaruh Budaya Patriarki Pada Perekonomian Keluarga Baru Suku Nias Menurut Pandangan Feminisme Marxis Sosialis, maka penulis menyusun kerangka teoritis dengan menggunakan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini. Seperti teori Feminisme Marxis Sosial, teori Budaya Patriarki, teori Pernikahan dan teori Mahar Pernikahan.

### **1.7.1 Feminisme Marxis Sosialis**

#### **a. Teori Ekonomi Marxis**

Ilmu ekonomi Marxis menyatakan bahwa kapitalisme adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, dalam kapitalis, penguasa atau pengusaha memanfaatkan tenaga kerja. Pekerja memerlukan upah untuk memenuhi kebutuhannya, meski pun upah yang diperolehnya lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperolehnya. semua tenaga kerja mempunyai harga dan menjadi dasar transaksi pertukaran. Kapitalisme bersifat eksploitasi, karena pemilik modal membayar pekerja hanya berdasarkan tenaga kerja mereka, tanpa juga membayar pekerja atas tenaga kerja manusia yang mereka keluarkan dan kecerdasan yang mereka transfer ke dalam komoditas yang mereka produksi yang mempekerjakan pekerja lebih lama tanpa membayar lembur dan menyebabkan adanya asumsi bahwa pemikiran perempuan terbentuk dari pekerjaannya. Pemikiran ini akan menjadi sifat dan sikap perempuan Pemilik modal akan melakukan monopoli alat produksi, peralatan pabrik, tanah, alat transportasi dan alat komunikasi, pekerja hanya di berikan dua pilihan, bekerja dengan tenaga lebih dan upah kecil atau tidak bisa bekerja sama sekali dan mendapatkan pekerjaan. gaji. Jadi para pekerja menganggap tidak masalah jika mereka hanya mendapat upah kecil atas pekerjaan yang mereka lakukan, dibandingkan tidak mendapat upah sama sekali.

## **b. Teori Masyarakat Marxis**

Menurut Marx, kesadaran kelas adalah kebalikan dari kesadaran palsu, keadaan pikiran yang menghalangi penciptaan dan pemeliharaan kesatuan kelas yang sebenarnya. Kesadaran yang salah menyebabkan orang-orang yang di eksploitasi menjadi percaya bahwa mereka bebas bertindak dan berbicara seperti halnya para pengeksploitasi. Kaum borjuis sangat mahir dalam membodohkan kaum proletar, sama halnya dengan pengalaman posisi perempuan dan suami dalam rumah tangga seperti borjuis dan proletar, mungkin memiliki cukup banyak kesamaan untuk memberikan motivasi perjuangan mengupayakan kampanye upah dalam pekerjaan rumah tangga. Para pekerja bukan saja tidak mempunyai hak untuk menentukan komoditas apa yang akan mereka jadikan atau mereka tidak akan berproduksi, tetapi hasil jerih payah mereka juga akan disita dari mereka. Oleh karena itu, kepuasan dalam menentukan kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa, barang dan jasa ini akan dijual dan tidak diberikan kepada pekerja ya sehingga pekerja hanya menerima upah yang terkadang tidak sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka selama proses produksi. Memperlakukan isolasi terhadap perempuan sangat meresahkan karena mereka adalah perempuan tidak menghargai diri sendiri dan menjadi budak bagi suaminya perasaan dalam diri perempuan sepenuhnya bergantung pada harga diri suami, keluarga dan teman-temannya terhadapnya. Jika mereka mengungkapkan perasaan cinta terhadapnya, dia akan senang, tetapi jika mereka gagal mengucapkan syukur meski pun begitu, dia akan sedih.

## **c. Teori Politik Marxis**

Perjuangan perempuan di kelas nya di intimidasi di tempat kerja karena kepentingan pemberi kerja bukanlah kepentingan pekerja. pemilik modal berkepentingan untuk menggunakan langkah apa pun yang mereka bisa diperlukan merendahkan pekerja perempuan baik dalam melakukan pelecehan, pemecatan atau pun menggunakan kekerasan untuk membuat pekerja bekerja lebih banyak secara efektif

dan efisien dengan upah yang lebih rendah dari nilai pekerjaannya. Marx menyatakan bahwa masyarakat, khususnya perempuan, memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan di dalam batas-batas sistem, namun mereka tidak mempunyai banyak suara dalam menentukannya batas-batas itu sendiri diakibatkan dari pengendalian pemilik modal

#### **d. Teori Hubungan Keluarga Marxis**

Budaya Patriarki muncul dari hubungan keluarga Marxis yang melakukan penindasan terhadap perempuan sama seriusnya dengan penindasan terhadap pekerja. Pemanfaatan tenaga perempuan dalam keluarga sangat terlihat kondisi materi keluarga menentukan kedudukan perempuan dalam keluarga. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan sebagai hartanya, maka perempuan itu akan tinggal di kediaman laki-laki itu, ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi bagi keluarga dan kelompok, karena perempuan juga dapat diandalkan dalam produksi kebutuhan rumah tangga dan keterampilan perempuan dalam menciptakan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang menjadikannya aset. Untuk mengakui anak perempuan sebagai keturunannya, laki-laki menuntut kesetiaan perempuan, tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Karena laki-laki tidak mengakui dan mewariskan harta benda dari anak yang bukan hasil pembuahan nya. Beban perempuan sebagai istri dan ibu mulai dari pemenuhan hawa nafsu laki-laki, melahirkan anak, menghasilkan barang-barang materi seperti tempat tidur, pakaian, alat masak. Pengendalian ini didasarkan pada laki-laki yang bertugas mencari makan di luar rumah, sehingga perempuan bergantung pada laki-laki pada saat itulah terjadi pekerjaan menurut gender, perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, mengolah apa yang diberikan suaminya dari luar rumah sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan di ruang untuk menghasilkan pangan untuk kebutuhan keluarga, semakin banyak laki-laki di ruang publik maka semakin meningkat pula kemampuannya. Hal ini menyebabkan status perempuan di masyarakat semakin terpukul, karena hanya menunggu laki-laki yang memikul kebutuhan rumah tangga. Laki-laki dianggap lebih

penting karena merupakan pencari nafkah keluarga, juga menuntut hak atas keturunannya karena beralasan bahwa “hak-hak ibu harus dicabut dan memang demikian adanya”.

Feminisme marxis sosialis menganggap kapitalisme adalah sistem tentang hubungan atau relasi kekuasaan serta sistem pertukaran. Kapitalisme juga dianggap mengeksploitasi. Seperti dalam pekerjaan, majikan menggunakan pekerja atau budaknya untuk mendapatkan keuntungan. Pekerja harus bekerja untuk mendapatkan upah dan majikan akan memberikan upah terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Marxis sosialis mengatakan bahwa status sosial sangat menentukan cara pandang masyarakat. Perbedaan kelas atau jenis kelamin adalah sumber utama dalam penindasan perempuan. Kapitalisme dan patriarki adalah satu kesatuan yang bekerja sama untuk menindas perempuan. Kapitalisme menindas perempuan sebagai pekerja dan patriarki menindas perempuan sebagai perempuan, sekali pun perempuan memiliki pekerjaan dan status sosial<sup>16</sup>

#### **e. Teori Feminis Marxis Sosial**

Rosemarie Tong, dalam perspektif feminis Marxis, memandang pernikahan sebagai institusi yang sering kali merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan patriarkal dalam masyarakat. Dalam pandangannya, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan emosional antara individu, tetapi juga sebagai alat yang mengatur dan mempertahankan ketidaksetaraan gender. Tong berargumen bahwa keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi yang mendukung kapitalisme. Dalam konteks ini, pernikahan seringkali dijadikan sarana untuk mengelola produksi dan reproduksi, di mana perempuan sering kali bertanggung jawab atas pekerjaan domestik yang tidak terbayarkan. Hal ini memperkuat ketergantungan perempuan pada laki-laki dan memperkuat hierarki dalam struktur keluarga. Dalam institusi pernikahan, laki-laki sering kali berada dalam posisi dominan, yang berdampak pada hubungan kekuasaan di dalam

---

<sup>16</sup> Rosemarie Tong, 2014. *Feminist Thought. A More Comprehensive Introduction*. University Of North Carolina, Charlotte. Westview Press. Fourth Edition

rumah tangga. Ini menciptakan dinamika di mana perempuan memiliki sedikit kendali atas keputusan penting, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Tong menekankan bahwa pernikahan dapat menjadi bentuk penindasan, di mana perempuan dipaksa untuk mematuhi norma-norma dan ekspektasi yang ditetapkan oleh masyarakat patriarkal.<sup>17</sup> Pernikahan juga berperan penting dalam peneguhan peran gender tradisional. Perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi sebagai ibu dan pengasuh, sementara laki-laki sebagai pencari nafkah. Ini memperkuat stereotip gender yang membatasi potensi individu dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan di luar rumah tangga. Dengan demikian, menurut Rosemarie Tong, pemahaman tentang pernikahan perlu dilihat dari sudut pandang yang kritis, mempertimbangkan bagaimana institusi ini berkontribusi pada pemeliharaan struktur kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat.

### **1.7.2 Konsep Budaya Patriarki**

Patriarki muncul karena adanya sejarah, patriarki memiliki permulaan dalam sejarah. Patriarki adalah sebuah proses panjang yang berkembang selama ribuan tahun. Dalam patriarki laki-laki di anggap superior dan perempuan adalah inferior. budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal. Konsep patriarki ini merujuk pada sistem pemerintahan di mana laki-laki memerintah masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Pandangan laki-laki memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan, karena perempuan dianggap lemah dan tak berdaya dari sistem pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap wajar adalah pria melakukan perang, pergi berburu, memancing, bekerja, mendapatkan bahan mentah dan peralatan yang dibutuhkan sedangkan perempuan mengurus rumah dan menyiapkan makanan dan pakaian, memasak, menenun. Laki- laki bekerja di publik dan perempuan bekerja di domestik atau rumah. Perempuan dianggap hanya tempat reproduksi anak-anak dari laki-laki, melakukan pekerjaan domestik untuk melayani laki-laki serta di kendalikan oleh laki-laki dalam bentuk seksualitas.

---

<sup>17</sup> Tong, Rosemarie. "Towards a feminist global ethics." *Global Bioethics* 33. 1 (2022): 14-31.

Laki- laki menggambarkan hierarki atas orang lain seperti mendominasi atas perempuan. Sistem ini seakan-akan memaksa perempuan harus bergantung kepada laki-laki baik walaupun perempuan tersebut memiliki tingkatan kelas atas yang terhormat. Dalam pembuatan sejarah, mayoritas sejarawan adalah laki-laki dan mereka mencatat apa yang telah mereka lakukan dan di alami serta di anggap penting oleh laki-laki. Dalam hal ini terjadi pengabaian dan tidak di catat terhadap pengalaman yang di alami serta yang telah dilakukan oleh perempuan. Ilmu sejarah mencatat bahwa perempuan di anggap sebagai marjinal dalam pembuatan peradaban dan tidak penting untuk dijadikan makna sejarah. Dengan demikian catatan yang direkam dan tulis oleh manusia pada masa lalu hanyalah sebagian catatan, karena menghilangkan setengah masa lalu umat manusia yaitu perempuan, terjadinya penyimpangan dan memutar balikkan fakta karena hanya menceritakan dari sudut pandang kehidupan laki-laki saja.

Laki-laki dan perempuan telah mengalami banyak perbedaan, baik pengucilan maupun diskriminasi yang disebabkan oleh tingkatan kelas. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa perempuan terpinggirkan. Perempuan sebenarnya mayoritas, setara dengan laki-laki tetapi dalam susunan dan struktur yang dibentuk oleh masyarakat, menjadikannya perempuan sebagai minoritas. Dalam keminoritasan perempuan, perempuan menjadi korban dari subordinasi aspek-aspek di dalam kehidupan . Dominasi laki-laki dalam pekerjaan berbayar di ruang publik sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah kecil atau tidak mendapatkan upah sama sekali, ini menggambarkan patriarki sebagai struktur dan praktik sosial yang menindas dan mengeksploitasi perempuan atas dominasi laki-laki.

Adapun pembagian utama patriarki dalam bentuk utama yaitu, patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik di dasarkan pada produksi rumah tangga sebagai alat yang utama untuk menindas perempuan sedangkan patriarki publik di dasarkan pada tempat-tempat publik seperti pekerjaan dan pemerintahan. Patriarki memiliki 6 struktur yang memiliki hubungan sebab akibat antara lain, patriarki produksi, patriarki dalam pekerjaan berbayar, patriarki



dalam negara, patriarki kekerasan laki-laki, patriarki dalam hubungan seksual dan terakhir patriarki dalam institusi budaya<sup>18</sup>

Dalam pembuatan sejarah, mayoritas sejarawan adalah laki-laki dan mereka mencatat apa yang telah mereka lakukan dan di alami serta di anggap penting oleh laki-laki. Dalam hal ini terjadi pengabaian dan tidak di catat terhadap pengalaman yang di alami serta yang telah dilakukan oleh perempuan. Ilmu sejarah mencatat bahwa perempuan di anggap sebagai marjinal dalam pembuatan peradaban dan tidak penting untuk dijadikan makna sejarah. Dengan demikian catatan yang direkam dan tulis oleh manusia pada masa lalu hanyalah sebagian catatan, karena menghilangkan setengah masa lalu umat manusia yaitu perempuan, terjadinya penyimpangan dan memutar balikkan fakta karena hanya menceritakan dari sudut pandang kehidupan laki-laki saja.

Laki-laki dan perempuan telah mengalami banyak perbedaan, baik pengucilan maupun diskriminasi yang disebabkan oleh tingkatan kelas. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa perempuan terpinggirkan. Perempuan sebenarnya mayoritas, setara dengan laki-laki tetapi dalam susunan dan struktur yang dibentuk oleh masyarakat, menjadikannya perempuan sebagai minoritas. Dalam keminoritasan perempuan, perempuan menjadi korban dari subordinasi aspek-aspek di dalam kehidupan<sup>24</sup>. Dominasi laki-laki dalam pekerjaan berbayar di ruang publik sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah kecil atau tidak mendapatkan upah sama sekali, ini menggambarkan patriarki sebagai struktur dan praktik sosial yang menindas dan mengeksploitasi perempuan atas dominasi laki-laki. Adapun pembagian utama patriarki dalam bentuk utama yaitu, patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik di dasarkan pada produksi rumah tangga sebagai alat yang utama untuk menindas perempuan sedangkan patriarki publik di dasarkan pada tempat-tempat publik seperti pekerjaan dan pemerintahan. Patriarki memiliki 6 struktur yang memiliki hubungan sebab akibat antara lain, patriarki produksi, patriarki dalam pekerjaan berbayar,

---

<sup>18</sup> Gerda Lerner, 1986. *The Creation Of Patriarchy*. Oxford Universty Press. New York. Oxford

patriarki dalam negara, patriarki kekerasan laki-laki, patriarki dalam hubungan seksual dan terakhir patriarki dalam institusi budaya<sup>19</sup>

### 1.7.3 Konsep pernikahan

Pernikahan adalah kontrak alami, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan atas dasar cinta antara pasangan dan ditetapkan Allah, yang memiliki tujuan antara lain, pertama untuk pengasuhan dan pendidikan anak dan yang kedua untuk saling membantu, berdasarkan persahabatan manusia. pernikahan juga didasarkan pada niat untuk terus menerus hidup bersama, dengan rasa persatuan, kehormatan, martabat dan cinta. Dalam pernikahan pun dituntut kesetiaan untuk mempertahankan iman yang telah dijanjikan dan tidak memutuskan ikatan suami istri dengan alasan melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merusak hubungan suami istri<sup>20</sup>

Menurut undang-undang dasar pernikahan yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pernikahan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap pernikahan di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat beberapa syarat- syarat dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Pernikahan harus dilandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun ke atas harus mendapatkan izin dari kedua orang tua;
- c. Jika salah satu orang tua dari kedua mempelai meninggal dunia atau sedang dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup mendapatkan izin dari kedua orang tua yang masih hidup yang mampu menyatakan kehendaknya;

---

<sup>19</sup> Sylvia Walby, 1990. *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell, Cambridge, Usa.

<sup>20</sup> Vazques, Tijerina, 2023. *Marriage And The Culture Of Peace*. Routledge, Taylor And Francis Group

- d. Jika kedua orang tua sudah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka akan izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. Jika ayah di atas atau salah satu atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah setelah lebih mendengar orang-orang tersebut di atas;
- f. Ayat-ayat di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari bersangkutan tidak menentukan lain<sup>21</sup>

Adapun pernikahan menurut adat bukan sekedar perikatan hukum perdata tetapi juga ikatan adat. Hukum adat mempunyai akibat hukum yang sah, di mana hukum adat itu ditegakkan. Perjanjian adat yang dimaksud adalah ikatan pernikahan tidak hanya mengikat kedua mempelai (kedudukan suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua) tetapi juga mengikat hubungan antara adat dan istiadat, hak waris, kekerabatan, kekerabatan, kemasyarakatan serta hal-hal yang berkaitan dengannya upacara adat dan keagamaan yang dihadiri pasangan. Sehingga pernikahan adat dilakukan dengan campur tangan masyarakat, sanak saudara, keluarga, harkat dan martabat serta urusan pribadi calon pengantin. Di Indonesia, sistem adat tiap daerah berbeda-beda.

Ada sistem lamaran adat yang dilakukan laki-laki kepada perempuan, ketika menikah perempuan akan mengikuti suaminya untuk tinggal di keluarga suami, kemudian terdapat sistem lamaran yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, di mana setelah menikah laki-laki akan tinggal di rumah perempuan dan terdapat sistem adat perkawinan antara laki-laki dan perempuan, namun setelah menikah pasangan tersebut dapat hidup bebas sesuai kesepakatan<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan

<sup>22</sup> Santoso, dkk, 2023. Pengantar Hukum Perkawinan. Pustaka Baru Press, Yogyakarta

#### 1.7.4 Konsep Mahar pernikahan

Mahar merupakan sejumlah hadiah dan keuntungan dari salah satu pihak berupa pemberian emas. Pemberian ini digunakan untuk membelanjakan keperluan yang berkaitan dengan pernikahan sebelum dan sesudah acara pernikahan dan mahar bukan hanya penyatuan antara pasangan laki-laki dan perempuan tetapi penyatuan kedua keluarga besar. Sebagai contohnya dapat kita lihat dalam keluarga Hindu India, mahar merupakan penentu pandangan masyarakat terhadap keluarga pemberi mahar. Pemikiran jika keluarga perempuan mampu membayar mahar, maka laki-laki yang diinginkan perempuan tersebut tidak direbut oleh orang lain dan mungkin meringankan penderitaan yang akan dialami perempuan tersebut ketika sudah menikah dengan laki-laki yang diinginkannya. Sehingga hal ini membuat keluarga perempuan akan mengusahakan mahar sesuai permintaan dari keluarga laki-laki seperti emas, uang atau hadiah<sup>23</sup>.

Selanjutnya pada pemberian mahar di wilayah Valencia di dasarkan karena adanya pernikahan. Mahar mewakili perempuan atas kehormatan diri mereka, keluarga dan status mereka di masyarakat. Ketika mahar tersebut sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga laki-laki maka perempuan tersebut akan terlepas dari latar belakang sosial yang rendah. Perempuan memberikan mahar kepada laki-laki yang akan dinikahinya, dengan balasan laki-laki akan memberikan berupa hadiah (*creix*) diberikan kepada perempuan pengakuan atas keperawanannya. *Creix* ini di bayarkan kepada perempuan di dasarkan atas hal-hal seksual serta untuk menghasilkan keturunan. Upaya perempuan untuk memberikan mahar dilihat dari kemampuan mereka bekerja dan keluarga pun membantu berupaya untuk memberikan mahar yang terbaik kepada laki-laki yang ingin di nikahi, dapat berbentuk uang, properti, rumah, pedang. Adanya beban pernikahan kepada laki-laki yang telah diberikan mahar, laki-laki harus menyediakan kebutuhan rumah tangga dan tempat tinggal, namun jika suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka laki-laki wajib mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya oleh pihak perempuan. Begitu pun ketika terjadi perceraian maka mahar yang diberikan perempuan wajib dikembalikan oleh pihak laki-laki, karena

---

<sup>23</sup> Arya, Bhattacharya, 2023. Dowry And Daughters. The Social, Religious And Legal Dilemma Of Denying Dowry. Routledge, Taylor And Francis Group

mahar selalu di pandang sebagai milik perempuan, ini menandakan bahwa mahar adalah tanda kemandirian ekonomi perempuan<sup>24</sup>.

## **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Proses penelitian kualitatif akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data dari partisipan yang spesifik tentang mahar dalam budaya pernikahan adat Nias. Penelitian ini juga melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data atau literatur yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau juga yang dibuat untuk menangani masalah mendasar yang berpusat pada tinjauan kritis dan menyeluruh dari literatur yang relevan serta menggunakan situs online yang membahas tentang feminisme sosial, budaya patriarki dan mahar pernikahan.

### **1.8.1 Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mengumpulkan sendiri data melalui proses dokumentasi selama melakukan wawancara dengan partisipan. Wawancara akan dilakukan melalui proses *deep interview* dengan metode *voice recorder* dan *fields note*

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dari 8 juni 2024 sampai dengan 20 juni 2024 di daerah pulau Jawa. Data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, antara lain: Pasangan suami istri suku Nias yang melakukan pernikahan adat di Pulau Nias

---

<sup>24</sup> Dana Wessel Lightfoot, 2013. *Women, Dowries And Agency*. Manchester University Press  
29

menggunakan adat Nias sebanyak 5 pasangan dan tokoh adat dan budayawan sebanyak 4 orang. Kemudian data sekunder akan dikumpulkan melalui dokumen, buku atau artikel yang mendukung data dalam penelitian ini.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 penelitian ini berisi landasan penyusunan tesis antara lain: Latar Belakang Masalah Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan Bidang, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI DASAR EKONOMI KAPTALIS**

Dalam bab 2 ini menjelaskan perkembangan budaya patriarki baik secara Internasional, Asia, lalu kemudian Indonesia dan suku Nias perkembangan, serta membahas faktor- faktor, dan dampak budaya patriarki.

### **BAB III POSISI PEREMPUAN BERDASARKAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS**

Dalam bab ini menjelaskan posisi perempuan berdasarkan pandangan feminisme marxis sosialis.

### **BAB IV PENENTUAN MAHAR PADA BUDAYA PATRIARKI MEMENGARUHI EKONOMI KELUARGA BARU, KHUSUSNYA PADA MASYARAKAT SUKU NIAS MENURUT PANDANGAN FEMINISME MARXIS SOSIALIS**

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari wawancara, literatur, jurnal dan buku- buku yang berkaitan dengan penentuan mahar adat Nias dan pengaruh ekonomi dalam penentuan mahar adat Nias.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan penulis.

